

TESIS

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Revenue Retribution Analysis in Tourism Sector and Its Contribution
Towards Locally Generated Revenue of North Toraja District*

OKTOVIANUS DATULINGGI'

A042191037



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Revenue Retribution Analysis in Tourism Sector and Its Contribution
Towards Locally Generated Revenue of North Toraja District*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

OKTOVIANUS DATULINGGI'
A042191037



KEPADA

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

disusun dan diajukan oleh

OKTOVIANUS DATULINGGI'
A042191037

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 30 Juli 2021


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., MA
NIP: 196305161990031001

Pembimbing Pendamping,


Dr. Muhammad Sobarsyah, S.E., M.Si
NIP. 196806291994031000

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,


Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP: 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP: 196402051988101001

TESIS

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh :

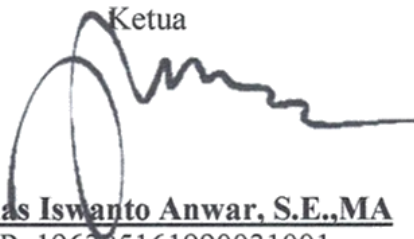
MARLIN PALAYUKAN
A042191036

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Juni 2021

Komisi Penasehat

Ketua



Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E.,MA
NIP: 196305161990031001

Anggota



Dr. Muhammad Sobarsyah, S.E.,M.Si
NIP. 196806291994031000

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si
NIP.197106192000031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OKTOVIANUS DATULINGGI'

NIM : A042191037

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Oktovianus Datulinggi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur patut saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena anugera-Nya yang melimpah, serta kasih setia-Nya yang berkelimpahan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan di Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun judul dari penulisan Tesis ini adalah : “ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya Tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran demi sempurnanya Tesis ini.

Dengan tersusunnya Tesis ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dwia Tina Pulubuhu, MA. Sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan izin, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak DR. Mursalim Nohong., SE., M.S.i. Sebagai Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin Makassar , yang telah memberikan arahan dan petunjuk selama saya menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan Magister Keuangan Daerah.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, (Bupati Toraja Utara 2016-2021) dan Yohanis Bassang SE, M.Si (Bupati Toraja Utara sekarang) yang telah

memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE.,MA selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Sobarsyah, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan Tesis ini.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada Program Magister Keuangan Daerah, Universitas Hasanuddin Makassar, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Teristimewa untuk Ayahanda dan Alm.Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, motivasi. Selama hidupnya Jasa beliau tak akan hilang sampai akhir hayat.
9. Istri tercinta dan Anak-anak tersayang yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi Program Magister Keuangan Daerah, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.
10. Seluruh rekan-rekan MKD, khususnya angkatan II yang telah saling mendukung untuk melalui perjuangan Bersama-sama, serta junior dan senior MKD, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Akhir Kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat diterima dan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Keuangan Daerah di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca.

Toraja Utara, November 2020

OKTOVIANUS DATULINGGI'
A042191037

ABSTRAK

OKTOVIANUS DATULINGGI. *Analisis Retribusi Pendapatan pada Sektor Pariwisata dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Anas Iswanto Anwar dan Muhammad Sobarsyah).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan analisis retribusi resit pariwisata dan kontribusinya pada pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif statistikal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode kuantitatif yang digunakan untuk menghitung potensi, efektivitas, dan efisiensi tingkat retribusi dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah selama 5 periode di Toraja Utara selama tahun 2015 - 2019 termasuk kategori efektif dan tingkat paling efisien. Retribusi pariwisata terjadi pada 2015.

Kata kunci: kontribusi, efisiensi, efektivitas



ABSTRACT

OKTAVIANUS DATULINGGI. *Revenue Retribution Analysis in Tourism Sector and Its Contribution Towards Locally Generated Revenue of North Toraja District* (Supervised by **Anas Iswanto Anwar** and **Muhammad Sobarsyah**)

This study aims to analyze and explains the Analysis of Tourism Receipt Retribution and Contribution to The Regional Income of North Toraja Regency.

The Analytical Method Used in This Study is A Quantitative Method with A Statistical Descriptive approach. Quantitative methods were used to calculate the potential, effectiveness, and efficiency of tourism levies and their contribution to the Local Own-source Revenue of North Toraja Regency for a period of 5 years. In North Toraja Regency from 2015-2019 was in the effective category, and the most efficient level of efficiency for the Tourism Retribution occurred in 2015.

Keywords: Contribution, Efficiency, Effectiveness



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 <i>Grand Theory</i>	12
2.1.1 <i>Stakeholder Theory</i>	12
2.1.2 <i>Stewardship Theory</i>	13
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.4 Retribusi Daerah	16
2.1.5 Potensi Retribusi.....	18
2.1.6 Pariwisata.....	29
2.1.7 Kontribusi Retribusi Pariwisata	25
2.1.8 Efisiensi Retribusi Pariwisata	26
2.1.9 Efektivitas Retribusi Pariwisata.....	27

2.2	Penelitian Terdahulu	28
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN.....		32
3.1	Kerangka Berpikir.....	32
3.2	Hipotesis	32
BAB IV METODE PENELITIAN		35
4.1	Lokasi Penelitian.....	35
4.2	Jenis dan Sumber Data.....	35
4.3	Metode Analisis	35
4.4	Definisi Operasional.....	37
4.4.1	Retribusi Sektor Pariwisata.....	37
4.4.2	Pendapatan Asli Daerah.....	37
4.4.3	Efektivitas	38
4.4.4	Efisiensi	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		39
5.1	Potensi Pariwisata	39
5.2	Perkembangan PAD	50
5.2.1	Pertumbuhan PAD Tahun 2015-2019	50
5.2.2	Kontribusi Komponen PAD 2015-2019.....	52
5.3	Hasil Analisis	53
5.3.1	Hasil Trend Retribusi Sektor Pariwisata	53
5.3.2	Hasil Efektivitas Retribusi Pariwisata	56
5.3.3	Hasil Efisiensi Etribusi Pariwisata.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		64
6.1	Kesimpulan	64
6.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....		67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Target Realisasi PAD	3
Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan.....	7
Tabel 1.3 Retribusi Sektor Pariwisata.....	8
Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi	27
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas.....	28
Tabel 5.1 Daftar Objek Wisata	39
Tabel 5.2 Realisasi Penerimaan PAD	51
Tabel 5.3 Kontribusi Komponen PAD.....	52
Tabel 5.4 Kontribusi Sektor Pariwisata	54
Tabel 5.5 Efektivitas	57
Tabel 5.6 Efisiensi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 kerangka konseptual.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan salah satu bagian dasar dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat mengembangkan daerah dan pemeratakan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan beberapa kegiatan

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, daerah memperoleh hak dan wewenang untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya sendiri. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah (Handoko, 2012).

Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan mampu untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri terutama pada kondisi finansial yang menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah yang dilihat dari tinggi rendahnya PAD.

Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah otonom yang terus berupaya meningkatkan PAD. PAD merupakan indikator keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Toraja Utara		
	Target (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	Persentase (%)
2015	39,20	33,81	86,24
2016	44,05	34,90	79,23
2017	66,51	44,17	66,41
2018	58,22	41,98	72,10
2019	56,22	51,88	88,05

Sumber: LRA BPKAD Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 33,71 persen dan 3,22 persen. Sementara pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 26,56 persen. Pada tahun 2018 pertumbuhan PAD Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan sebesar 19,33 persen. Fluktuasi pertumbuhan PAD

Kabupaten Toraja Utara menunjukkan belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Begitu halnya dengan Kabupaten Tana Toraja, pada tahun 2018, realisasi PAD mencapai Rp106,11 miliar, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp141,78 miliar.

Undang-undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa kepariwisataaan bertujuan untuk: 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat; 3) menghapus kemiskinan; 4) mengatasi pengangguran; 5) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 6) memajukan kebudayaan; 7) mengangkat citra bangsa; 8) memupuk rasa cinta tanah air; 9) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan 10) mempererat persahabatan antar bangsa. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan dan pendayagunaan sumber daya yang dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pandangan ini didukung oleh pendapat Spillane (Septiyastuti, dkk. , 2014: 653) yang mengatakan bahwa secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Spillane lebih lanjut menjelaskan bahwa pariwisata dapat dilihat sebagai kegiatan mengembangkan potensi obyek dan daya wisata serta kawasan-kawasan wisata potensial secara berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian proses pembangunan (Spillane dalam Septiyastuti, dkk. , 2014: 653).

Pariwisata saat ini merupakan kebutuhan utama yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara (Rois, Fadliyanti, dan Wijimulawiani, 2017). Beberapa ekonom telah meneliti bahwa pariwisata menjadi salah satu yang berkontribusi langsung bagi pendapatan suatu negara (Dritsakis, 2004). Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, peternakan, perindustrian, dan pertambangan merupakan potensi pendapatan yang dimiliki daerah Toraja Utara. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memberikan pemasukan cukup besar terhadap penerimaan daerah di Toraja Utara. Wisata alam, budaya, dan sejarah adalah kegiatan usaha di sektor pariwisata yang dapat memberikan peluang besar bagi Kabupaten Toraja Utara, dimana Toraja Utara merupakan daerah wisata yang memiliki banyak pengunjung baik itu pengunjung lokal maupun internasional. Menurut Kepala Dinas Pariwisata, Harly “adat budaya serta objek wisata yang dimiliki daerah Toraja Utara sudah cukup dikenal dunia dan perlu menjadi perhatian dinas pariwisata dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD)” (www.maccanews.com).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah (Takaria, 2017). Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Berdasarkan survei statistik keuangan daerah, PAD Toraja Utara tahun 2013 hingga 2016 mengalami kenaikan sebesar 13.24%.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan

pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kedatangan wisatawan pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata. Besar kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya atau antara suatu Negara dengan negara lainnya (Sammeng 2001). Menurut Salah Wahab (Salah, 2003) dalam bukunya "Tourism Management" pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Tabel 1.2.
Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Tahun	Wisatawan		jumlah
	Nusantara	Mancanegara	
2015	87.462	41.058	128.520
2016	112.728	66.170	178.898
2017	223.210	60.186	283.396
2018	256.907	53.157	178.898
2019	363.065	32.772	283.396

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa wisatawan mancanegara mengalami penurunan meskipun pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, akan tetapi tahun berikutnya memperlihatkan kecenderungan penurunan jumlah wisatawan yang drastis terutama untuk wisatawan mancanegara. Penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Tana Toraja berarti keterpurukan sektor pariwisata Toraja Utara sebagai sektor ekonomi lokal.

Dengan demikian penurunan jumlah wisatawan ini sangat berpengaruh kepada pertumbuhan perekonomian Toraja Utara. Hal tersebut dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata menurun.

Penyebab penurunan Pariwisata mancanegara Toraja Utara adalah ketidakmampuan Pariwisata Toraja Utara memenuhi kebutuhan wisatawan. Peran pemerintah dan kelembagaan yang belum optimal serta kondisi objek wisata yang monoton dan tidak menarik telah menjadi penyebab utama penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Toraja Utara. Akibatnya tidak memotivasi wisatawan berkunjung ke Toraja Utara.

Peningkatan pendapatan daerah diperoleh dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Salah satu potensi yang memberikan sumbangsih pendapatan yang cukup besar di Kabupaten Toraja Utara berasal dari sektor pariwisata. Banyak objek wisata dan kegiatan kepariwisataan yang didirikan di Toraja Utara yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara terhadap PAD Toraja Utara.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menargetkan meningkatnya kunjungan wisata yang diwujudkan dalam penerimaan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan retribusi dari sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Selain itu,

penerimaan retribusi sektor pariwisata juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.3
Restribusi Sektor Pariwisata 2015-2019

Tahun	Jumlah
2015	Rp 797,619,200
2016	Rp 1.126.105.200
2017	Rp 1.575.010.000
2018	Rp 3,510,245,600
2019	Rp 3.170.305.000

Sumber: Diolah dari data DPPKAD, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan tabel 1.3 maka dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 prosentase kontribusi Restribusi Pariwisata terhadap PAD sebesar 2,4% hal ini berarti bahwa sumbangan Restribusi Pariwisata terhadap PAD adalah sebesar 2,4 %. Pada tahun 2016 prosentase kontribusi Restribusi Pariwisata terhadap PAD sebesar 3,1 %. Pada tahun 2017 kontribusi Restribusi Pariwisata terhadap PAD sebesar 3,4% yang berarti bahwa sumbangan Restribusi Pariwisata terhadap PAD adalah sebesar 3,4%. Pada tahun 2018 sumbangan Restribusi Pariwisata terhadap PAD adalah yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 8,3 %, Sedangkan Pada tahun 2019 kontribusi Restribusi Pariwisata terhadap PAD sebesar 6,6 %.

Oleh karena itu perlu diadakan studi mengenai penerimaan daerah dari subsektor pariwisata seberapa besar kontribusi atau peranan yang diberikan pariwisata yang diwujudkan melalui upaya-upaya pengembangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mendukung atau meningkatkan PAD, serta bagaimana kontribusi peningkatan jumlah tempat

wisata terhadap PAD. Fenomena adanya peningkatan retribusi sektor pariwisata harus bisa dikembangkan lagi dengan melakukan pembangunan infrastruktur pada objek-objek wisata karena di Toraja Utara memiliki banyak objek wisata alam yang belum terekspose yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, Seperti penelitian yang Mardianis (2018) Melakukan Pembinaan Masyarakat yang Sadar Wisata. Strategi peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan karena jika masyarakat tidak mampu membaca peluang-peluang yang ada di bidang pariwisata maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan wisata yakni peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Yeni Ratanawati dengan judul analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kutai timur, Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada lokasi penelitian .Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang seberapa besar kontribusi retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara?
3. Bagaimana kontribusi retribusi sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam merumuskan kebijakan pengelolaan retribusi dengan tepat sehingga PAD meningkat maksimal.

2. Sebagai laporan evaluasi untuk melihat kondisi penerimaan retribusi sektor pariwisata dan kontribusi dalam PAD Kabupaten Toraja Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.2.1 *Stakeholder Theory*

Dalam Penelitian ini menggunakan *Stakeholder Theory*. Istilah Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (2010 :12). Freeman (2011 :22) mendefinisikan stakeholder sebagai “any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.” bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Organisasi sektor publik, sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam.

Bryson (2001) mendefinisikan stakeholder ialah suatu individu, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauhmana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utama (masyarakat sebagai stakeholder utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang - Undang Dasar 2006

pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Stewardship Theory

Selain teori stakeholder, teori lain yang mendasari penelitian ini ialah teori stewardship. Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 2009, 2010) dalam Raharjo (2007). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, menurut Murwaningsari (2009) Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori stewardship. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan keuangan suatu daerah diarahkan untuk terus meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya, sehingga daerah diharapkan dapat memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan suatu pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan hal yang terus dipacu oleh Pemerintah Daerah karena Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

Kaho (2010) menyatakan bahwa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada suatu kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Untuk menyelenggarakan semua urusan yang diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut urusan otonomi ataupun kewenangan *medebewind*, daerah tentu memerlukan sumber daya keuangan. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara lain, pemberian kewenangan harus juga disertai dengan

penyerahan sumber dana keuangan, baik berupa sumber daya yang dimobilisasi dari daerah itu sendiri maupun berupa subsidi dari pemerintah daerah yang menjalankan sejumlah kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah (Syaukani dkk, 2002).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri (Koswara, 2000). Pada era otonomi daerah sekarang ini, kecenderungan meningkatkan PAD dengan melakukan ekstensifikasi pajak sangat sering dilakukan oleh pemerintah daerah. Kecenderungan ini berbahaya karena akan lebih membebani rakyat.

Ada dua cara untuk meningkatkan PAD yaitu menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah serta menetapkan target PAD setiap tahun secara rasional (Harun, 2004). Sebagai salah satu sumber PAD, retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah dimungkinkan untuk dipungut dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Hasil retribusi daerah berupa pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah, baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pemerintah daerah dan berdasarkan peraturan daerah.

2.1.4 Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Pengertian retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Prakosa, 2003).

Retribusi sebagai salah satu sumber PAD masih perlu mendapat perhatian karena peranannya cukup strategis dalam menunjang pembiayaan pembangunan di daerah. Selanjutnya dalam UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan atas 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Jasa umum adalah jenis yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. Jasa usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
3. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menyebutkan beberapa jenis dan obyek pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota yakni meliputi 29 obyek retribusi. Dari sejumlah retribusi tersebut, retribusi RPH merupakan komponen yang cukup potensial sebagai penyumbang PAD Kabupaten Toraja Utara.

2.1.5 Potensi Retribusi

Potensi didefinisikan sebagai daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur melalui dua pendekatan yakni berdasarkan atas indikator social ekonomi (Prakosa, 2003).

Selanjutnya Kaho (2010) menyebutkan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu.

Potensi suatu retribusi dapat diartikan sebagai jumlah retribusi daerah yang seharusnya diterima pemerintah daerah jika tidak ada obyek retribusi yang luput dan seluruh wajib retribusi membayar kewajibannya sebesar yang telah ditentukan oleh peraturan daerah yang berlaku (Widodo, 2006). Pengertian lain dikemukakan oleh Mardiasmo dan Makhfath (2000) yang menyatakan bahwa potensi retribusi adalah upaya untuk mengetahui besar potensi retribusi tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka potensi retribusi rumah potong hewan dapat diartikan sebagai nilai atau kemampuan yang terkadang dalam obyek

retribusi RPH yang secara keseluruhan menjadi sumber penerimaan retribusi. Bila potensi dapat diketahui secara riil, maka hal ini tentu sangat membantu dalam menetapkan target penerimaan tahunan yang diharapkan diperoleh dari retribusi RPH. Perhitungan potensi penerimaan retribusi penting dilakukan agar penentuan target penerimaan lebih tepat, perencanaan yang lebih baik dan kinerja administrasi dapat dinilai.

2.1.6 Pariwisata

Secara etimologis, pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “pari” berarti ‘banyak, berkali-kali, berputar-putar’ dan “wisata” berarti ‘perjalanan’ atau ‘bepergian’. Berdasarkan arti kata ini di definisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Sementara itu, seorang ahli turisme asing terkenal bernama G.A. Schmoll menyatakan bahwa *“tourism is a highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function type organization, range of service provided and method used to market and sell them.* Schmoll menyatakan bahwa usaha turisme itu tergolong industri yang dibedakan atas tipe-tipe: besarnya, tempatnya yang tersebar, dan luasnya pelayanannya.

Pada hakikatnya pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar.

Pariwisata yang berasal dari kata wisata, menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi.³

Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan tentang ketentuan umum tentang pariwisata, asas, fungsi, dan tujuan pariwisata, prinsip penyelenggaraan pariwisata, pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis, usaha pariwisata, hak, kewajiban dan larangan, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, koordinasi, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, gabungan industri Pariwisata Indonesia, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

a. Asas Pariwisata

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, kesatuan.

b. Fungsi pariwisata

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

c. Tujuan pariwisata

Kepariwisataan bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan, mempererat persahabatan antar bangsa.

d. Ciri-ciri Pariwisata

Melakukan perjalanan ditentukan oleh keinginan yang mendorong seseorang untuk bepergian ke daerah yang akan dituju. Melakukan perjalanan wisata adalah hal yang menyenangkan dan disukai oleh semua orang. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, sehingga bisa disebut pariwisata, antara lain:

- 1) Harus bersifat sementara
- 2) Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa
- 3) Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah atau bayaran.

Selain itu, ada beberapa ciri-ciri wisata, antara lain:

- a) Berupa perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asal.
- b) Pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara waktu.
- c) Perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- d) Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut.
- e) Terdapat unsur-unsur produk wisata.
- f) Ada tujuan yang ingin dicapai dari perjalanan wisata tersebut.
- g) Biaya perjalanan diperoleh dari negara asal.

h) Dilakukan dengan santai.

e. Jenis-Jenis Pariwisata

Setiap wisatawan yang melakukan pariwisata memiliki motif tersendiri terutama dalam hal wisatawan luar daerah. Perbedaan motif-motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis pariwisata karena suatu daerah maupun suatu negara pada umumnya dapat menyajikan berbagai atraksi wisata yang akan berpengaruh pada fasilitas yang perlu disiapkan dalam pembangunan maupun program promosi maupun periklananya.

Jenis-jenis wisata yang dikenal saat ini yaitu:

1) Wisata Budaya

Wisata budaya adalah suatu kegiatan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka

2) Wisata Industri

Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam kesuatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara yang telah maju perindustriannya dimana masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang dihasilkan secara massal di

negara itu.

3) Wisata Sosial

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan, misalnya bagi kaum buruh, pemuda, pelajar, mahasiswa, petani dan sebagainya. Organisasi ini berusaha untuk membantu mereka yang mempunyai kemampuan terbatas dari segi finansialnya untuk mempergunakan kesempatan libur atau cuti mereka dengan mengadakan perjalanan yang dapat menambah pengalaman serta pengetahuan mereka, dan sekaligus juga dapat memperbaiki kesehatan jasmani dan mental mereka.

4) Wisata Pertanian

Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya. dimana wistawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayuran dan palawija di sekitar kebun yang dikunjungi.

5) Wisata Maritim atau Wisata Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan jenis wisata air, danau, bendungan, pantai, teluk atau laut lepas, seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar,

balapan mendayung, berkeliling melihat-lihat taman laut dengan pemandangan yang indah dibawah permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritim.

6) Wisata Cagar Alam

Jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengususkan usaha-usahanya dengan jalan mengatur wisata ke tempat cagar alam, taman lindung, hutan, daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat lain.

7) Wisata buru

Jenis wisata ini banyak dilakukam di negeri-negeri yang memiliki daerah-daerah hutan tempat berburu, yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru diatur dalam bentuk safari buru kedaerah hutan yang telah ditetapkan pemerintah negara yang bersangkutan

8) Wisata petualang

Dikenal dengan istilah *adventure tourism*, seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajah (*off the beateb track*), penuh binatang buas, mendaki tebing teramat tajam.

Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya Tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut. Jadi, bisa disimpulkan pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha.

2.1.7 Kontribusi Retribusi Pariwisata

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau uang iuran. Sedangkan definisi dari retribusi pariwisata yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa serta layanan yang diberikan kepada masyarakat umum di lokasi yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata. Berdasarkan definisi tersebut apabila dihubungkan dengan retribusi sektor pariwisata maka kontribusi retribusi pariwisata merupakan sumbangan atau uang iuran yang diperoleh dari retribusi sektor pariwisata.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan 100% (Halim, 2004:163).

Untuk perhitungan kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menggunakan rumus:

$$P_n = \frac{X_n}{Y_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : kontribusi retribusi sektor pariwisata tahun tertentu

X_n : realisasi retribusi sektor pariwisata tahun tertentu

Y_n : realisasi PAD tahun tertentu

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, apabila kontribusinya tinggi maka akan semakin baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah.

2.1.8 Efisiensi Retribusi Pariwisata

Efisiensi merupakan salah satu cara dalam mengelola sumber keuangan, material, proses, peralatan, tenaga kerja maupun biaya secara efektif (Sadikin, 2005:157). Efisiensi menggambarkan tentang perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2004:164).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan efektivitas, yaitu rasio perbandingan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (outcome) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya terendah.

Untuk mengukur tingkat efisiensi retribusi sektor pariwisata dapat dihitung dengan rumus berikut:

efisiensi

$$= \frac{\text{biaya pemungutan retribusi}}{\text{realisasi penerimaan retribusi pariwisata}} \times 100\%$$

Secara umum, klasifikasi nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi

Prosentase	Kriteria
Kurang dari 60%	Sangat Efisien
60% - 80%	Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
Lebih dari 100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, (2016:142)

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa definisi efisiensi retribusi pariwisata merupakan perbandingan antara biaya pemungutan retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi sektor pariwisata.

2.1.9 Efektivitas Retribusi Pariwisata

Efektivitas merupakan unsur pokok yang ada untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dapat dikatakan efektif apabila tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan tersebut dapat tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh realisasi yang dihasilkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara apabila dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah maka efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan (Halim, 2004:164). Sedangkan apabila dihubungkan dengan retribusi pariwisata maka efektivitas retribusi pariwisata merupakan perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan retribusi sektor pariwisata.

Untuk mengukur efektivitas yaitu menggunakan rumus berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi pariwisata}}{\text{target realisasi pariwisata}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Prosentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, (2016:141)

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas retribusi sektor pariwisata merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan pendapatan yang diterima dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari retribusi pariwisata yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target retribusi pariwisata kemudian dikalikan dengan 100%.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini berisi tentang beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis dan menjadi

pertimbangan dalam menyusun skripsi ini, adapun penelitian- penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Elfayang Rizky Ayu Puspitasari dan Abdul Rohman (2014) yang melakukan penelitian dengan judul ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah masuk ke dalam kategori sangat efektif, kedua, tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan adalah efisien, ketiga, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013 kurang berkontribusi, dan yang terakhir yaitu kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013 berkontribusi sedang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Daryanti (2013) dengan judul KONTRIBUSI OBJEK WISATA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa melalui retribusi yang diberikan oleh objek wisata, pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya semakin meningkat. Rata-rata per tahun perkembangan retribusi daerah dari tahun 2007 sampai dengan 2009 sebesar 1,35%. Dengan adanya pendistribusian hasil retribusi maka Kabupaten Kuantan Singingi dapat menaikkan taraf hidup

masyarakatnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan serta melakukan pemerataan pendapatan secara menyeluruh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Kurniasari (2009). Dengan judul PERANAN RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GRESIK (STUDI KASUS PADA WISATA RELIGI MAKAM SUNAN GIRI DI KABUPATEN GRESIK) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan tarif yang menyebabkan meningkatnya pendapatan retribusi wisata religi Sunan Giri yang memberikan kontribusi sebesar 22,15% pada Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2012, kontribusi menurun menjadi 18,17% yang disebabkan oleh proporsi dari jumlah Pendapatan Asli Daerah yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan di tahun 2013 meningkat menjadi 20,89% hal itu disebabkan karena meningkatnya jumlah pengunjung pada objek wisata tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Cantika Bella, Imam Hanafi, dan Abdul Wachid (2013) dengan judul penelitian KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang) Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

kontribusi retribusi yang dibayarkan pedagang apabila dilihat dari nominal rupiah yang diterima Pemerintah Kota Malang dari Pasar Wisata Kota Malang adalah sebesar Rp 22.032.000. Retribusi Pasar Wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 264.384.000 dapat dilihat bahwa besaran retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Malang dinilai wajar, para pedagang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Peningkatan kontribusi retribusi di Pasar Wisata Kota Malang sudah membatasi jumlah pedagang sehingga upaya untuk meningkatkan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sulit dilakukan.

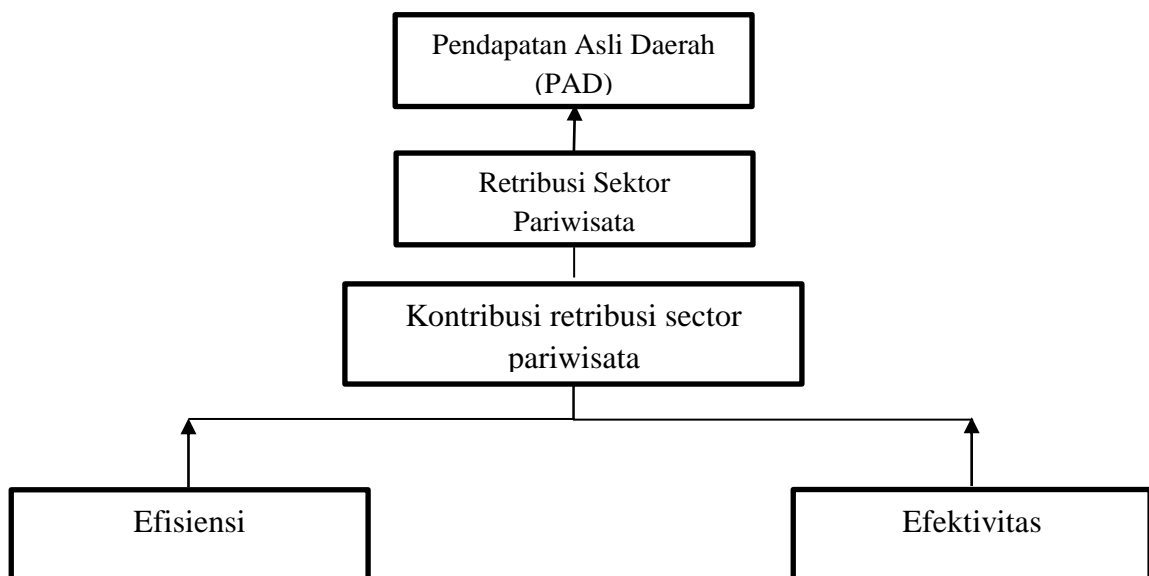
BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri terutama pada kondisi finansial dimana yang menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah adalah dilihat dari tinggi rendahnya PAD. Setiap Pemerintah Daerah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerahnya sendiri yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu alternatif yang paling banyak dipilih dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu melalui pengoptimalan potensi sektor pariwisata. Keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata akan berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah melalui retribusi dari sektor pariwisata.

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian



3.2 Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kontribusi retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten toraja utara . Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari retribusi sektor pariwisata Kabupaten Toraja Utara serta memprediksikan pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Toraja Utara untuk beberapa tahun ke depan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah yaitu menggunakan rumus kontribusi yang merupakan perbandingan antara jumlah retribusi pariwisata dengan pendapatan asli daerah yang kemudian dikalikan dengan 100%. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Diduga bahwa penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara belum efisien

Selain kontribusi, peneliti ingin mengetahui tingkat efisiensi pemungutan retribusi yaitu dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi pariwisata. Pemungutan retribusi pariwisata dikatakan efisien apabila diperoleh rasio efisiensi yaitu sebesar kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi maka menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik.

H2 : Diduga bahwa penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara belum efektif

Selanjutnya, untuk mengetahui efektivitas retribusi pariwisata yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan target yang telah ditentukan. Penerimaan retribusi pariwisata akan semakin efektif

jika diperoleh rasio lebih dari 100%. Rasio efektivitas yang tinggi menggambarkan bahwa kemampuan daerah tersebut semakin baik.

H3 : Diduga bahwa belum maksimalnya kontribusi retribusi sector pariwisata di Kabupaten Toraja Utara